

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah saat ini menginginkan keterbukaan yang lebih besar dalam penggunaan dana untuk aktivitas pemerintahan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya serta memiliki tingkat keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi, audit oleh lembaga audit eksternal diperlukan untuk menjamin kualitas informasi yang disajikan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen yang menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi keuangan dan kinerja entitas tersebut. Sebagai pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, masyarakat percaya bahwa laporan tersebut disusun dengan baik dan tepat. Ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Agar dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah dengan efektif, penting untuk memastikan kejelasan dan transparansi mengenai penggunaan dana untuk operasi pemerintah. Untuk memastikan kepatuhan laporan keuangan pemerintah terhadap prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang telah ditetapkan, partisipasi pihak ketiga yang independen sangatlah penting guna mengevaluasi kelayakan dan kesesuaian laporan keuangan pemerintah.

Selama proses audit, masalah diidentifikasi, bukti dikumpulkan, dan auditor meninjau bukti tersebut secara independen dan objektif untuk menilai keakuratan dan kesesuaian informasi dalam laporan keuangan terhadap standar yang berlaku. Melalui proses audit, diharapkan bahwa auditor dapat mengevaluasi

informasi yang tercantum pada laporan keuangan. Kualitas hasil audit serta opini yang dihasilkan bergantung pada penilaian yang dilakukan oleh auditor, yang kemudian akan menentukan penerimaan atau penolakan terhadap audit judgment tersebut. Proses evaluasi dan pemberian opini audit memerlukan pertimbangan yang disebut audit judgment. Audit judgment menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan dan mempertimbangkan opini ketika membuat keputusan. Audit judgment mencerminkan sudut pandang auditor terhadap informasi yang memengaruhi keputusan mengenai laporan keuangan, serta dokumentasi bukti yang telah diperoleh (Siregar, et al., 2019). Saat melakukan penilaian, auditor mengumpulkan informasi yang tepat dengan berbagai tempo dan mengintegrasikan informasi yang didapatkan dengan bukti-bukti audit sebagai dasarnya. Ketika mengeluarkan pendapat terhadap laporan keuangan, auditor perlu menilai bukti yang sudah diidentifikasi untuk menetapkan kualitas dan hasil dari pelaksanaan audit tersebut.

Di akhir tahun, tanggung jawab akuntabilitas pemerintah daerah tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk melakukan pelaporan keuangan tersebut, pemerintah daerah wajib memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan panduan untuk menyelaraskan pemikiran antara penyusun, pengguna, dan auditor. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukkan betapa pentingnya mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, pemerintah daerah wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang

mengikuti pedoman SAP serta harus diaudit oleh BPK RI. BPK bertanggung jawab dalam melakukan audit terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh eksternal auditor pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu tujuan dari audit BPK terhadap laporan keuangan daerah yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah berisi data keuangan yang akurat. Sebagai auditor pemerintah, BPK berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah yang tersusun dan terstruktur sesuai dengan SAP. SAP menjadi panduan yang mengintegrasikan pemikiran antara penyusunan, penggunaan, dan audit laporan keuangan. Auditor BPK melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) karena dihadapkan pada berbagai tantangan seperti SDM, biaya, dan waktu pelaksanaan yang berisiko tinggi. Oleh sebab itu, auditor diharuskan untuk teliti dalam menjalankan tugas audit dan membuat keputusan audit yang tepat (Dilla, 2021).

Menurut ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan empat jenis pendapat terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), (3) Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Berdasarkan data yang bersumber dari hasil LHP LKPD yang dikeluarkan oleh BPK RI dalam periode tahun 2019-2022, provinsi Sumatera Utara konsisten mendapatkan pendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau disingkat WTP ([sumut.bpk.go.id](http://sumut.bpk.go.id)). Selain itu, dalam rentang tahun yang sama, lebih dari 20 kabupaten/kota di Sumatera Utara dari total 34 kabupaten/kota memperoleh opini audit WTP setiap tahunnya. Ini membuktikan tingkat pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Akan tetapi, fakta tersebut berbanding terbalik dengan adanya peningkatan kasus korupsi yang tercatat dalam evaluasi ICW (*Indeks Corruption Watch*). ICW melaporkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, jumlah kasus korupsi di Sumatera Utara terus meningkat. Pada tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara telah mencatat 7 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 18.000.000.000.

Dengan adanya peningkatan LKPD yang memperoleh opini WTP, diharapkan kasus korupsi di pemerintahan daerah hendaknya akan berkurang. Akan tetapi, data di lapangan malah menunjukkan hal sebaliknya. Meskipun BPK memberikan Opini *Unqualified Opinion* (WTP) dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak menjamin bahwa tidak ada lagi penyimpangan dalam pemerintahan, baik di tingkat desa, kabupaten/kota, maupun nasional. Seperti praktik korupsi jual-beli status “Wajar Tanpa Pengecualian” yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Empat auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah diberi suap sebesar Rp 1.900.000.000 miliar oleh Ade Yasin, Mantan Bupati Bogor, dengan maksud untuk memastikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 mendapat penilaian "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) (antaranews.com, 2022).

Dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, audit judgment sangat penting, terutama dalam pembentukan opini. Audit judgment sangat penting bagi auditor saat berperilaku dan mengambil keputusan karena diperlukan ketika informasi dan data yang diperoleh tidak jelas dan terbatas. Auditor juga diharuskan mampu membuat asumsi yang dapat digunakan untuk merumuskan dan mengevaluasi judgment. Audit judgment merupakan perspektif yang diambil oleh auditor saat menemukan informasi yang memengaruhi dokumen bukti dan pengambilan keputusan terkait laporan keuangan. Auditor membuat keputusan pada setiap langkah proses audit dengan mengumpulkan bukti yang relevan dan menyatukan informasi dari bukti tersebut. Kualitas hasil audit dan pendapat yang dihasilkan dari pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh tepat atau tidaknya audit judgment tersebut.

Terdapat dua faktor yang memengaruhi audit judgment yaitu faktor teknik dan non-teknis. Batas waktu audit maupun ruang lingkup audit adalah faktor teknis, sedangkan aspek perilaku auditor sendiri adalah faktor non-teknis. Banyak praktisi akuntansi dan akademisi telah memperhatikan hal ini. Penting bagi auditor, terutama yang bekerja di BPK, untuk memiliki dorongan internal maupun eksternal dalam menetapkan kebijakan audit, khususnya terkait dengan audit judgment. Standar umum kedua dalam Standar Profesional Keuangan Negara (SPKN) menekankan bahwa auditor perlu mempertahankan sikap skeptis, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan terus mempertanyakan bukti yang ada.

Sikap skeptisme menjadi keharusan bagi auditor karena mereka harus terus menganalisis dan mempertanyakan bukti audit secara kritis. Auditor harus menggunakan skeptisme profesional sepanjang proses audit, mulai dari penerimaan tugas hingga pembentukan opini audit dalam laporan audit. Bukti dari kepatuhan auditor terhadap prinsip skeptisme profesional adalah berdasarkan perilakunya pada pemikiran kritis dan pendekatan khusus terhadap informasi yang diberikan oleh manajemen, yang terdiri dari adanya keraguan terus-menerus tentang keandalan dan pembentukannya atas dasar visi yang tepat tentang jumlah dan jenis prosedur audit yang dibutuhkan untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan dapat diterima (Fabiianska, et al., 2021). Ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan audit guna memastikan bahwa dalam proses audit, bukti yang digunakan dapat dipercaya dan relevan dengan kondisi lapangan. Ketika skeptisme auditor rendah, risiko kecurangan cenderung meningkat karena auditor mungkin sangat percaya pada informasi yang diterima dari klien tanpa bukti yang kuat. Sebaliknya, dengan skeptisme yang tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan menjadi lebih rendah. Oleh sebab itu, penting bagi auditor untuk mempertahankan sikap skeptisme saat melakukan audit. Sikap ini mencerminkan pendekatan yang kritis dan evaluatif terhadap tugas audit, yang dikenal sebagai skeptisme auditor. Penelitian oleh Dilla (2021), Ginting & Munawarah (2022), dan Abdallah (2024) telah menegaskan bahwa skeptisme auditor berkontribusi secara positif dan terhadap audit judgment. Karena auditor memiliki tanggung jawab untuk menyajikan hasil audit yang akurat, mereka harus

selalu menjaga sikap skeptisme agar proses pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan kritis dan akurat, sehingga audit judgment yang dihasilkan menjadi tepat.

Pengalaman kerja auditor juga mempengaruhi auditor dalam membuat keputusan karena dengan pengalaman praktik dan kemampuan yang telah diperoleh selama bertugas menjadikan auditor lebih paham atas semua bukti yang relevan dan membuat auditor lebih cermat pada informasi yang berhubungan dengan judgment yang akan dibuat, auditor lebih memahami kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan mengetahui apa yang menyebabkannya (S & R, 2020). Hasil penilaian audit judgment dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh auditor. Judgment profesional menjadi keterampilan yang diperoleh auditor dari waktu ke waktu, dikombinasikan dengan keterampilan tersebut pengalaman dan pengetahuan, yang memungkinkan dia mencapai penilaian yang masuk akal, tidak bergantung pada pendapat orang lain dan bebas dari bias material (Henrizi, et al., 2021). Apalagi dengan perubahan zaman dan kebiasaan-kebiasaan yang saat ini sudah serba teknologi, mewajibkan setiap auditor untuk belajar memahami sistem informasi yang digunakan oleh auditee. Memperoleh pengetahuan dan menambah pengalaman dalam mengaudit teknologi sistem informasi menjadi hal yang harus diperhatikan. Auditor di era revolusi industri tidak bisa mengabaikan kemajuan teknologi dan dampaknya dalam pekerjaan mereka sebagai auditor. Penelitian Lombardi (2023) mengungkapkan bahwa auditor yang berinteraksi dengan teknologi menunjukkan proses mengolah informasi dapat berjalan dengan konsisten dan pengurangan beban dan upaya yang berlebihan. Dengan pengalaman auditor yang mumpuni dan terus berkembang sesuai kemajuan

zaman, auditor dapat mengatasi tantangan yang muncul selama proses audit yang akhirnya memengaruhi kualitas dari penilaian audit judgment yang dihasilkan.

Tingkat kerumitan kasus audit ditentukan oleh seberapa mudah atau tidaknya proses audit dapat diselesaikan, seberapa banyak sumber informasi yang tersedia, dan seberapa banyak pengalaman auditor. Pengalaman auditor dapat membantu menyelesaikan proses audit yang kompleks. Menurut Ariyantini et al. (2014) dalam penelitian Rahmadanty & Muslimin (2020), jika kerumitan proses audit lebih besar daripada pengalaman auditor, hal itu dapat mengganggu proses audit dan mempengaruhi hasil laporan audit. Kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor memainkan peran penting dalam menentukan hasil dari keputusan audit. Menurut Safitri et al. (2022), tingkat kesulitan tugas dapat mempengaruhi pengalaman dan pengetahuan auditor dalam melakukan audit. Auditor cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas yang kompleks, yang bisa menghambat kemampuan mereka untuk menyatukan informasi dengan efektif. Seiring dengan meningkatnya tingkat kompleksitas tugas, terdapat risiko penurunan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi potensi kecurangan selama proses audit, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kualitas dari audit judgment yang dihasilkan.

Terlebih lagi, dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian dan penggunaan sistem informasi auditee sering terhambat karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan auditor dalam teknologi dan sistem informasi. Teknologi tidak hanya mengubah cara kerja auditor, tetapi juga mengubah tugas yang mereka lakukan. Jika seorang auditor tidak meningkatkan pemahaman dan

keterampilan di bidang teknologi informasi, maka cakupan audit yang bisa mereka tangani akan terbatas pada perusahaan yang tidak menggunakan teknologi informasi (Prasita & Priyo (2007) dalam Aida (2021). Berdasarkan analisis terhadap beberapa penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa audit judgment dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor.

Hasil dari berbagai penelitian mengenai audit judgment masih menunjukkan ketidak-konsistenan. Hal ini disebabkan oleh sifat subjektif dari judgment auditor, lemahnya etika profesional serta sikap kritis auditor dalam mengumpulkan dan evaluasi bukti audit. Dengan demikian, penting untuk terus melaksanakan penelitian ini, mengingat auditor berperan sebagai pihak independen yang dipercayai oleh masyarakat.

Secara umum, audit judgment dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk skeptisme profesional auditor, kompleksitas tugas yang dihadapinya, dan pengalaman auditor. Proses penilaian auditor didasarkan pada pertimbangan persepsinya terhadap informasi laporan keuangan yang dikumpulkan, serta faktor-faktor dalam dirinya sendiri. Auditor memiliki kewenangan untuk menentukan dengan tepat tingkat materialitas serta membuat kesimpulan berdasarkan bukti audit yang terkumpul. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan secara jelas salah saji material dalam laporan keuangan yang diaudit (Vincent & Asesoga, 2020). Lebih lanjut, menurut Jamilah dkk. (2007) dalam Aida (2021), tanggung jawab seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit terletak pada kemampuannya untuk mengambil keputusan yang tepat

berdasarkan pertimbangan informasi dan bukti yang tersedia. Proses audit membutuhkan pertimbangan/judgment di hampir setiap tahapannya. Pertimbangan ini akan memengaruhi jenis pendapat yang diberikan oleh auditor dan berdampak pada efisiensi pelaksanaan tugas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Muhsin (2022) yang berjudul *"An Analysis of the Influence of Auditor Professional Skepticism and Effort on Audit Judgment Performance."* Perbedaannya terletak pada penambahan variabel independen, yaitu pengalaman auditor dan kompleksitas tugas, serta perbedaan lokasi penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

Pertama, alasan menambah variabel pengalaman auditor adalah dalam ranah audit, pengalaman audit mengacu pada pengalaman yang didapatkan oleh auditor dalam mengerjakan audit terhadap laporan keuangan suatu entitas. Seorang auditor yang menyelesaikan berbagai jenis tugas serta durasi waktu dimana mereka menjalankan tugas profesionalnya, dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi kecurangan atau ketidakakuratan.

Kedua, alasan menambah variabel kompleksitas tugas adalah karena auditor sering kali menghadapi banyak tugas yang kompleks, beragam, dan saling terkait satu sama lain. Auditor sering dihadapkan dengan tugas-tugas yang tidak terstruktur, dan membingungkan, sehingga sulit untuk mengidentifikasi alternatif yang ada, mengumpulkan data, dan memprediksi hasil dari data tersebut. (Cecilia Engko (2008) dalam Azizah & Pratono, (2020)). Kompleksitas tugas dapat menggambarkan tingkat inovasi dan pertimbangan audit yang diperlukan oleh auditor dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Ketiga, perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian sebelumnya dilakukan di BPK RI Pusat, sementara penelitian ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Sumatera Utara..

Terakhir, keempat adalah perbedaan teknik analisis, dimana penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis SEM atau *Structural Equation Modelling* sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya terkait audit judgment dan adanya *research gap* dalam penelitian, penulis bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Skeptisme, Pengalaman Auditor, dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekurangan dalam penerapan etika profesional dan kurangnya skeptisme pada seorang auditor berdampak pada timbulnya berbagai masalah dalam proses pengumpulan bukti-bukti audit, yang kemudian mempengaruhi hasil opini terhadap laporan keuangan.
2. Kegagalan auditor dalam membuat audit judgment karena sikap skeptisme auditor yang masih rendah.
3. Keterbatasan pengalaman mengakibatkan auditor kurang mampu mengidentifikasi masalah secara menyeluruh dan mendalam.

4. Tingkat kompleksitas tugas yang tinggi menyebabkan kesulitan bagi auditor dalam menghimpun informasi yang diperlukan selama audit, serta menghadapi tantangan dalam menyelesaikan tugas dan memproses informasi audit dengan efektif.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam ruang lingkup penelitian ini, penulis memberikan batasan pada masalah yang hendak dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Audit judgment akan diukur dengan hanya memakai tiga faktor, yakni skeptisme, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas.
2. Audit judgment menjadi variabel dependen yang akan diteliti.
3. Sampel penelitian terdiri dari auditor yang aktif bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Apakah skeptisme memberikan pengaruh terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah pengalaman auditor memberikan pengaruh terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah kompleksitas tugas memberikan pengaruh terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?

4. Apakah skeptisme, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas memberikan pengaruh secara simultan terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah skeptisme memberikan pengaruh terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apakah pengalaman auditor memberikan pengaruh terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui apakah kompleksitas tugas memberikan pengaruh terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui apakah skeptisme, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas memberikan pengaruh secara simultan terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menyangkut audit judgment, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan, antara lain:

1. Bagi Auditor

Hasil menunjukkan bahwa skeptisme berpengaruh positif terhadap audit judgment. Oleh karena itu, auditor harus mempertahankan sikap skeptisnya selama proses auditing demi menjaga martabat dan kode etik

profesi audit. Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Oleh karena itu, auditor lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang linier. Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit judgment. Jadi, auditor meningkatkan pengalamannya dan belajar dari pengalaman tersebut supaya dapat mengatasi kompleksitas tugasnya selama masa pemeriksaan.

## 2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis memiliki bekal sebagai calon auditor, yaitu pemahaman terkait skeptisme, pengalaman auditor dan kompleksitas tugas. Di mana, auditor harus memiliki jam kerja atau pengalaman yang tinggi dalam mengatasi kompleksitas tugas. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh keahlian berharga dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam analisis data.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini memberikan wawasan penting bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian kualitatif tentang analisis dampak skeptisme, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Skeptisme yang harus dipertahankan auditor, pengalaman auditor yang tinggi dapat mengatasi kompleksitas tugas yang dihadapi auditor dan ketiga variabel tersebut yang memengaruhi kemampuan auditor dalam menghasilkan audit judgment.